

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020

Kata Pengantar



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dikelola. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun LAK berdasarkan pada

Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengukuran kinerja tersebut diukur berdasarkan indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 antara Kepala Perwakilan dan Auditor Utama Keuangan Negara VI. Dengan mendasarkan pada indikator kinerja tersebut, maka LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Selain untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan kinerja Tahun 2020, kami juga berharap LAK Tahun 2020 ini dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 27 Januari 2021 Kepala Perwakilan

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CSFA., C.A. NIP 196807061990031003

DAFTAR ISI

	ATA PENGANTAR	i
	FTAR ISI	ii
	FTAR TABEL	iii
DA	AFTAR GAMBAR	V
BA	AB I PENDAHULUAN	1
	LATAR BELAKANG	1
В.	TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN	
	TENGAH	2
C.	STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI	
	KALIMANTAN TENGAH	5
D.		9
	TENGAH	
E.	PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)	17
BA	B II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN	
	OMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN	
	OVINSI KALIMANTAN TENGAH	19
Α.		
	KALIMANTAN TENGAH	19
В.	PERJANJIAN KINERJA	24
ВА	B III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI	
	LIMANTAN TENGAH (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA	
	K PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)	26
A.	PENCAPAIAN SKOR IKU BPK PERWAKILAN PROVINSI	
	KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019	28
В.	EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SKOR IKU BPK	
	PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019	25
C.	REALISASI ANGGARAN	57
ВА	AB IV PENUTUP	59
Τ.Δ	MPIRAN	7₹

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	
	Berdasarkan Golongan/Ruang	10
Tabel 2	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Kelompok Jabatan	10
Tabel 3	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	10
Tabel 0	Berdasarkan Persebaran Gender	10
Tabel 4	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	
	Berdasarkan Rentang Usia	11
Tabel 5	Rincian Anggaran RKP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan	
	Tengah Tahun Anggaran 2020	11
Tabel 6	Rincian Anggaran RKSP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020	12
Tabel 7	Tanah dan Bangunan	13
Tabel 8	Kendaraan Roda 4 dan 2	16
Tabel 9	Peralatan dan Mesin	16
Tabel 10	Jalan	16
Tabel 11	Jaringan	17
Tabel 12	Aset Tetap Lainnya	17
Tabel 13	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 (Anggaran	
	Berdasarkan DIPA Awal)	24
Tabel 14	Revisi Anggaran atas Sasaran Strategis Tahun 2020	25
Tabel 15	Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi	
	Kalimantan Tengah Tahun 2020	26
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Tiga	
	Tahun Terakhir	30
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka	
	Menengah	31
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Tiga	
	Tahun Terakhir	32
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka	
m 1 100	Menengah	33
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga	0.4
/D - 1 - 1 O 1	Tahun Terakhir	34
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka	26
Tabal 00	Menengah	36
Tabel 22	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	37
Tabel 23	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka	31
Tabel 25	Menengah	38
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Tiga	30
1400124	Tahun Terakhir	39
Tabel 25	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka	3)
1400120	Menengah	40
Tabel 26	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Tiga	10
14501 40	Tahun Terakhir	41
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka	• •
- 0.001 = 1	Menengah	41
Tabel 28	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga	_
	Tahun Terakhir	42

Tabel 29	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah	43
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga	73
Tabel 50	Tahun Terakhir	45
Tabel 31	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka	
	Menengah	45
Tabel 32	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga	
	Tahun Terakhir	46
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Target Jangka	
	Menengah	47
Tabel 34	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Tiga	
	Tahun Terakhir	49
Tabel 35	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Target	
	Jangka Menengah	50
Tabel 36	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Tiga	
	Tahun Terakhir	51
Tabel 37	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target	
	Jangka Menengah	51
Tabel 38	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian Tiga	
	Tahun Terakhir	52
Tabel 39	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target	
	Jangka Menengah	53
Tabel 40	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target	
	Jangka Menengah	54
Tabel 41	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target	
	Jangka Menengah	55
Tabel 42	Indikator Kinerja Keluaran Beserta Anggaran dan Realisasi	
	Tahun 2020	56
Tabel 43	Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2020	57
Tabel 44	Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2020	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan	
	Tengah	9
Gambar 2	Visualiasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	
Gambar 3	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan	
	Tengah	23
Gambar 4	Grafik Realiasi Capaian IKU 3 degan Capaian Tiga Tahun	
	Terakhir	35

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, untuk penerapan di lingkungan internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur juga dengan Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit kerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2020. Tujuan dari penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

 Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- 2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- 5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- 11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- 15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- 16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- 17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Pasal 618 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasu, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Subauditorat Kalimantan Tengah I

Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1. Merumuskan rencana kegiatan;
- 2. Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 7. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaab dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- 12. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Subauditorat Kalimantan Tengah II

Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

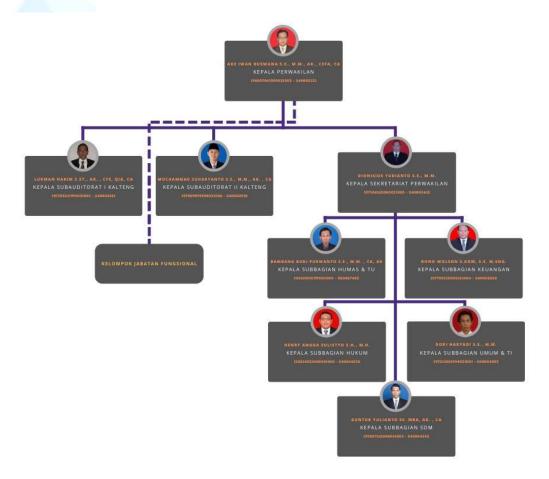
- 1. Merumuskan rencana kegiatan;
- 2. Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 7. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaab dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- 12. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Berikut struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 sebanyak 127 orang yang terbagi menjadi:

a. Berdasarkan Golongan/ruang jabatan

NO	UNIT KERJA	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	ттт	TOTAL
1	Kepala Perwakilan	1	0	0	0	0	1
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Subauditorat Kalteng I	1	0	0	0	0	1

NO	UNIT KERJA	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	ттт	TOTAL
4	Kepala Subauditorat Kalteng II	1	0	0	0	0	1
5	Subbagian SDM	0	5	1	0	2	8
6	Subbagian Keuangan	1	5	2	0	0	8
7	Subbagian Humas dan TU Kalan	2	3	1	0	1	7
8	Subbagian Umum dan TI	1	4	3	0	19	27
9	Subbagian Hukum	1	4	0	0	0	5
10	Subauditorat Kalteng I	3	31	0	0	0	34
11	Subauditorat Kalteng II	2	32	0	0	0	34
	Jumlah	14	84	7	0	22	127

Tabel 1 Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan/Ruang

b. Berdasarkan Kelompok Jabatan

		Kelompok Jabatan							
No.	Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional Pemeriksa	ттт	Total	
1	BPK Perwakilan	1						1	
2	Sekretariat Perwakilan		1					1	
3	Subauditorat Kalteng I		1			34		35	
4	Subauditorat Kalteng II		1			34		35	
5	Subbagian Hukum			1	4			5	
6	Subbagian Humas dan TU Kalan			1	5		1	7	
7	Subbagian Keuangan			1	7			8	
8	Subbagian SDM			1	5		2	8	
9	Subbagian Umum dan TI			1	7		19	27	
	Jumlah	1	3	5	28	68	22	127	

Tabel 2 Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Kelompok Jabatan

c. Persebaran Berdasarkan Gender

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN				
NO.	UNII KERJA	Laki-laki	Perempuan	TOTAL		
1	Kepala Perwakilan	1		1		
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	1		1		
3	Kepala Subauditorat Kalteng I	1		1		
4	Kepala Subauditorat Kalteng II	1		1		
5	Subauditorat Kalteng I	20	14	34		
6	Subauditorat Kalteng II	20	14	34		
7	Subbagian Hukum	4	1	5		
8	Subbagian Humas dan TU	2	5	7		
	Kalan	_	<u> </u>	•		
9	Subbagian Keuangan	4	4	8		
10	Subbagian SDM	1	7	8		

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN				
NO.	UNII KERJA	Laki-laki	Perempuan	TOTAL		
11	Subbagian Umum dan TI	22	5	27		
	JUMLAH	77	50	127		

Tabel 3 Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Persebaran Gender

d. Persebaran Berdasarkan Rentang Usia

NO.	Unit Kerja	<26	26 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 55	> 55	TOTAL
	Struktural			1	6	1	1	9
1	Subauditorat Kalteng I	4	12	10	6	2	0	34
2	Subauditorat Kalteng II	1	20	8	5	0	0	34
3	Subbagian Hukum	0	2	2	0	0	0	4
4	Subbagian Humas dan							
	TU Kalan	1	1	3	1	0	0	6
5	Subbagian Keuangan	2	2	3	0	0	0	7
6	Subbagian SDM	1	2	4	0	0	0	7
7	Subbagian Umum dan							
	TI	2	3	14	5	1	1	26
	JUMLAH	11	42	45	23	4	2	127

Tabel 4 Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Rentang Usia

e. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp20.268.525.000,- yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp7.910.564.000,00 dengan target 273 keluaran dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp12.357.961.000,00 dengan target 22 keluaran. adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel-tabel berikut.

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1.	LHP BPK Perwakilan	2,789,359,000	20 LHP
a.	LHP Keuangan	1,529,412,000	14 LHP
b.	LHP Kinerja	846,577,000	4 LHP
c.	LHP DTT	413,370,000	2 LHP

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
2.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	158,577,000	154 LHP
3.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2,590,446,000	21 LHP
a.	LHP Keuangan	1,809,100,000	15 LHP
b.	LHP Kinerja	587,082,000	4 LHP
c.	LHP DTT	194,264,000	2 LHP
4.	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	570,123,000	1 LHP
5.	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan	745,456,000	60 Laporan
a.	Laporan Pemantauan TLHP	320,800,000	30 Laporan
b.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian N/D	424,656,000	30 Laporan
6.	Rumusan Bahan Pendapat	2,113,000	1 Rumusan
7.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	906,270,000	12 Laporan
8.	Sumbangan IHPS Perwakilan	128,919,000	2 SIHPS
9.	Laporan Profil Entitas	19,301,000	2 Laporan
	Jumlah (1 s.d. 9)	7,910,564,000	273

Tabel 5 Rincian Anggaran RKP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1.	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.435.375.000	20 Laporan
a.	Layanan Hukum Perwakilan	206.348.000	4 Laporan
b.	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	383.552.000	4 Laporan
c.	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan	297.507.000	4 Laporan
d.	Layanan Keuangan Perwakilan	287.399.000	4 Laporan
e.	Layanan Umum Perwakilan	260.569.000	4 Laporan
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Perwakilan	804.995.000	1 Layanan
3.	Layanan Perkantoran	10.117.591.000	1 Layanan
a.	Gaji dan Tunjangan	6.165.080.000	
b.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.952.511.000	
a)	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dan TU	612.534.000	
b.	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	151.142.000	
c.	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	247.200.000	

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
d.	Layanan Perkantoran Bida Umum	ng 2.941.635.000	
	Jumlah (1 s.d. 3)	12.357.961.000	22

Tabel 6 Rincian Anggaran RKSP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020

f. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai yang disajikan dalam tabel-tabel berikut.

a. Tanah dan Bangunan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis BMN	Luas Tanah (m2)	Lokasi Tanah	Luas Bangunan (m2)	Lokasi Bangunan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5440	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya		JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1722	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya		JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7646	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya		Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			28	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
5	Gedung Pertokoan/Koper asi/Pasar Permanen			46	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

NT.	Ionia DMM	Turan Manah	Talaai Manah	T a -	I alaasi Dangaraan
No	Jenis BMN	Luas Tanah (m2)	Lokasi Tanah	Luas Bangunan (m2)	Lokasi Bangunan
6	Gedung Pos Jaga Permanen			7	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
7	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen			388	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
8	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2792	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanenkal			94	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
11	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen			414	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
12	Gedung Pos Jaga Permanen			7	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
13	Bangunan Tempat Parkir			50	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
14	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
15	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan

No	Jenis BMN	Luas Tanah (m2)	Lokasi Tanah	Luas Bangunan	Lokasi Bangunan
		()		(m2)	
					Raya, Palangka Raya
16	Bangunan Terbuka Lainnya			4000	JL. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
17	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
18	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
19	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
20	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen			78	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
21	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess			762	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
22	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen			105	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
23	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen			105	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
24	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen			105	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
25	Bangunan Terbuka Lainnya			10	JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

Tabel 7 Tanah dan Bangunan

b. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 pada BPK Perwakilan Provinsi/ Kalimantan Tengah

No	Nomor Dokumen Kepemilikan	Tanggal Dokumen Kepemilikan	Merk / Tipe / Jenis	Nomer Polisi
1	J03652543	19/10/2012	TOYOTA INNOVA G M/T	KH 1482 AU
2	L00219276	19/05/2014	TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T	B 1386 PQR
3	N-00063431	01/11/2016	TOYOTA ALL NEW KIJANG	KH 1024 TU
4	H-02873090	06/07/2010	INNOVA	B 1986 PQN
5	O-00331911	09/07/2018	TOYOTA	B1823 PQH
6	P-06107629	09/09/2019	HONDA/SUPRA X 125	KH 3497 TY
7	P-06107630	09/09/2019	HONDA/SUPRA X 125	KH 3498 TY
8	OKQGO7Y4K	09/10/2020	HONDA/SUPRA X 125	KH 3589 TY
9	L4573NO57	09/10/2020	HONDA/SUPRA X 125	KH 3590 TY

Tabel 8 Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

c. Peralatan dan Mesin pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kode	Uraian	Kuantitas		Nilai
1	3.01.03	Alat Bantu	6	Rp	2.053.881.700
2	3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	12	Rp	2.088.955.000
3	3.02.02	Alat Angkut Darat Tak Bermotor	2	Rp	3.850.000
4	3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	2	Rp	287.847.945
5	3.03.03	Alat Ukur	10	Rp	77.386.000
6	3.05.01	Alat Kantor	433	Rp	3.224.025.341
7	3.05.02	Alat Rumah Tangga	1396	Rp	7.231.141.900
8	3.06.01	Alat Studio	144	Rp	846.903.490
9	3.06.02	Alat Komunikasi	33	Rp	192.042.693
10	3.06.03	Peralatan Pemancar	14	Rp	520.401.431
11	3.07.01	Alat Kedokteran	14	Rp	29.702.000
12	3.07.02	Alat Kesehatan Umum	1	Rp	1.156.000
13	3.08.01	Unit Alat Laboratorium	19	Rp	137.412.000
14	3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	24	Rp	17.084.760
15	3.10.01	Komputer Unit	114	Rp	1.574.633.845
16	3.10.02	Peralatan Komputer	182	Rp	1.989.421.621
17	3.15.03	Alat Sar	1	Rp	5.000.000
18	3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	16	Rp	804.968.407

Tabel 9 Peralatan dan Mesin

d. Jalan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	5.01.01	JALAN	518	Rp
				294.373.600

Tabel 10 Jalan

e. Jalringan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kode	Uraian	Kuantitas		Nilai
1	5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR	5	Rp	395.301.665
		BAKU			
2	5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	2	Rp	77.954.663
3	5.03.09	INSTALASI PENGAMAN	1	Rp	123.517.330
4	5.03.10	INSTALASI LAIN	142	Rp	3.354.196.050
5	5.04.02	JARINGAN LISTRIK	4	Rp	640.760.415
6	5.04.03	JARINGAN TELEPON	1	Rp	40.683.500

Tabel 11 Jaringan

f. Aset Tetap Lainnya pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kode	Uraian	Kuantitas		Nilai
1	6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2403	Rp	228.110.968
2	6.01.03	KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN	4	Rp	265.320
3	6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	Rp	3.125.000

Tabel 12 Aset Tetap Lainnya

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut itu meliputi:

- a. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum kearah *impact*;
- b. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK;
- c. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- d. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko,

- independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk/mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*;
- e. Pengelolaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kualitas dan kuantitas SDM (pengelola dan fasilitator) belum mencukupi, kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, stakeholder belum sinergis, dan tata Kelola belum optimal;
- f. BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni:

- (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk/ memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan "Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat." Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut, yaitu:

- 1. Independensi, yaitu BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
- 2. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritras dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
- 3. Profesionalisme, yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI mendukung strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

Adapun sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi". Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dua sasaran sebagai berikut.

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas;
- 2) Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.

Berikut visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi", BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- c) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ;
- d) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- e) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- f) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- g) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- h) Hasil Evaluasi AKIP;
- i) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- j) Tingkat Penerapan Manjemen Pengetahuan;

- k) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
- 1) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian Indikator Kinerja. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2020. yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada tanggal 31 Januari 2020 yang diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota VI BPK.

Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

Sasaran Kegiata Angg	n, Sasaran, dan aran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp20.243.325.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan 	Rp8.507.956.000 Rp11.735.369.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
Pemeriksaan		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
	6	Tingkat Pemenuhan	100%
		Keterlibatan Satuan Kerja	
		dalam Pemeriksaan Tematik	
		Lokal	
	7	Indeks Implementasi Nilai	Sangat
		Dasar BPK	Memuaskan
			(5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A
			(86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan	95%
		Teknologi dan Informasi	
	10	Tingkat Penerapan	100%
		Manajemen Pengetahuan	
	11	Tingkat Kepuasan Para	Memuaskan
		Pemangku Kepentingan atas	(3,80)
		Kualitas Komunikasi	
	12	Pemenuhan Jam Diklat	100%
		Pengembangan Kompetensi	
	13	Tingkat Kinerja Implementasi	87%
		Anggaran	

Tabel 13 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 (Anggaran Berdasarkan DIPA Awal)

Pada tahun 2020 dilakukan revisi anggaran untuk beberapa keluaran sehingga terjadi perubahan anggaran atas Sasaran Strategis yang tersaji dalam tabel berikut.

Sasaran Stategis	Sasaran	Anggaran		
		Semula	Menjadi	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.507.956.000,-	Rp7.910.564.000,-	
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.735.369.000,-	Rp12.357.961.000,-	
Total Anggaran		Rp20.243.325.000,-	Rp20.268.525.000,-	

Tabel 14 Revisi Anggaran atas Sasaran Strategis Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

A. PENCAPAIAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	garan Rp20.268.525.000,-	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan	100%	86,67%
Meningkatnya Pemeriksaan	Rp7.910.564.000,-		Keyakinan Mutu Pemeriksaan		
Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp12.357.961.000,-	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	87,34%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	105%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,42
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (94,39)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,16

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	250%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaska n (3,80)	Memuaska n (3,96)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%	92,62%

Tabel 15 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **100,38**. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2019 yaitu **101,33**. Pada tahun 2020, skor kinerja diukur berdasarkan periode Renstra tahun 2020-2024 sedangkan tahun 2019 atas periode Rebstra tahun 2016-2020. Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Terdapat dua Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.
- 2. Terdapat empat Indikator Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;
 - c. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksan Tematik Lokal;
 - d. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

- 3. Terdapat tujuh Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
 - d. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
 - e. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - f. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
 - g. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut:

"Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI merupakan satuan kerja eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran program dalam Perjanjian Kinerja AKN VI sebagai berikut:

"Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif"

Dalam mendukung sasaran strategis AKN VI tersebut, BPK Perwakilan/ Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

"Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2020 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi/ perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling.

Realisasi capaian IKU 1 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaia	n
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan					
	Pemerolehan Keyakinan Mutu	100%	86,67%	86,67%	-	-
	Pemeriksaan					

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan di dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024. IKU ini merupakan gabungan beberapa IKU yang ditetapkan pada periode sebelumnya.

Pada Tahun 2020, Realisasi IKU ini sebesar 86,67% dari target 100%. IKU ini diukur melalui tiga sub IKU yaitu Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker dengan realisasi sebesar 100%, Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi LHP dengan realisasi sebesar 73,33% dan Sub IKU 1.3 tentang Hasil Reviu Itama sebesar 100%.

Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan *Quality Control* (QC) reviu berjenjang atas 21 (dua puluh satu) LHP yang telah diterbitkan tahun 2020 dan telah melaksanakan *Quality Assurance* (QA) melalui daftar pertanyaan yang merupakan bagian dalam Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang digunakan oleh pemeriksa untuk melaksanakan reviu atas pengendalian keyakinan mutu dalam proses pemeriksaan.

Selain itu capaian hasil evaluasi LHP yang dilakukan Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan (EPP) sebesar 73,33%. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 53,33% dan tingkat akurasi LHP sebesar 93,33%. Capaian ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu 100%. Untuk pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk secara intensif melakukan *cross review* antar tim pemeriksa untuk setiap LHP yang diterbitkan

Adapun capaian hasil reviu Itama yaitu sebesar 100%. Hasil ini menunjukan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dengan demikian IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan 2020.

Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 1 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Indikat	Indikator Kinerja				Targe	t		Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020	
			2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024	
IKU 1 Pement dan Per Mutu P	nerole	Pengendalian ehan Keyakinan ksaan	100%	100%	100%	100%	100%	86,67%	86,67%	

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 1 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas reviu hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 2 merupakan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Realisasi capaian IKU 2 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja		Realisasi		Capaia	n
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	-	-

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan di dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

Pencapaian IKU ini pada tahun 2020 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan evaluasi Direktorat EPP bahwa simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksan (P2).

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai berikut.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kota Palangka Raya dan Instansi Terkait Lainnya;
- 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Instansi Terkait Lainnya;
- 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Instansi Terkait Lainnya;
- 5. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penangan Pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penangan Pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 2 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

	Indikator Kinerja			Targe	t		Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020
		2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 2 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berusaha untuk meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada entitas yang diperiksa. Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Tindak lanjut (TL) dilakukan dalam rentang 60 hari sejak rekomendasi diterima, baik berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaannya.

IKU 3 merupakan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Pada Tahun 2020, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,34% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

Realisasi capaian IKU 2 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja		Realisasi		Capaian	
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	87,34%	87,34 %	86,46%	78,07%

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, pengukuran dilakukan atas seluruh rekomendasi atas LHP yang telah dterbitkan dan terinput dalam aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan

(SMP) dari Tahun 2005 s.d. Tahun 2019. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 karena metode pengukuran yang berbeda. Tahun 2018 metode pengukuran rekomendasi yang diukur berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama 5 tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memanfaatkan secara penuh Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Adapun pencapaian IKU 3 pada Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 11.551;
- b. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebesar 1.426;
- c. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 266;
- d. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebesar 118;
- e. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee sebesar 13.361.

Berikut grafik realisasi pencapaian IKU 3 untuk periode tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.



Gambar 4 - Grafik Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan pencapaian IKU 3 ditahun selanjutnya diantaranya yaitu:

- 1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam Pemerintah Daerah mendorong untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Pemerintah dalam mengevaluasi permasalahan Daerah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Perbandingan realisasi IKU 3 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja				Target			Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020
			2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024
IKU 3	Persentase Tindak Rekomendasi Pemeriksaan	Lanjut Hasil	75%	75%	75%	75%	75%	87,34%	116%

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut, persentase realisasi IKU 3 pada Tahun 2020 dibandingkan dengan target Tahun 2024 mencapai target 116%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat memenuhi target sampai tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Pada tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 100,89 dari target 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian IKU 4 tahun 2020 terhadap capaian tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian	
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan					
	Satuan Kerja dalam Pemeriksaan	100%	100,89%	100,89%	-	-
	Tematik Nasional					

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya dikarenakan pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2020. Capaian realisasi diatas berdasarkan atas enam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan dibandingkan dengan enam rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional serta ditambah dengan alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan sebesar 0,89%.

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan enam pemeriksaan tematik nasional berupa pemeriksaan kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu atas penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2020. Adapun entitas pemeriksaan atas pemeriksaan tematik nasional ini yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kinerja dan DTT), Kota Palangka Raya (Kinerja), Kabupaten Gunung Mas (Kinerja), Kabupaten Barito Timur (Kinerja), dan Kabupaten Murung Raya (DTT).

Berikut perbandingan realisasi IKU 4 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

		Indikator Kinerja			Target			Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020	
			2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024	
-	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 4 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. Setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema

pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100%. Pada tahun 2020, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pihak pemangku kepentingan sehingga IKU ini tetap merealisasikan 100% sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 5 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja		Realisasi		Capaia	n
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	-	-

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan di dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

Berikut perbandingan realisasi IKU 5 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja			Target			Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020	
		2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 5 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 6 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian 2020 2019 2018		
		2020	2020	2020	2019	2018	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan						
	Satuan Kerja dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	-	-	
	Tematik Lokal						

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan di dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

Pada triwulan II tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK Nomor 411/ND/X/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal penyesuaian anggaran per satker TA 2020. Penyesuaian anggaran ini berpengaruh terhadap penyesuaian objek pemeriksaan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) TA 2020. Pemeriksaan tematik lokal yang semula direncanakan untuk dilaksanakan TA 2020 dilakukan revisi menjadi pemeriksaan tematik nasional. Sehingga pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Berikut perbandingan realisasi IKU 6 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

In	ndikator Kinerja			Targe	t		Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020
		2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024
6 Ket	ngkat Pemenuhan terlibatan Satuan Kerja lam Pemeriksaan Tematik kal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 6 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berupaya menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'S.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU 7 merupakan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memahami visi, misi dan nilai dasar BPK sebagai bahan yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 7 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

ĺ		Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaia	1
			2020	2020	2020 2019 2		2018
	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		5,00	4,42	4,42	4,76	4,64

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

INDEKS IMPLEMENTASI NILAI DASAR
BPK

5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
2018
2019
2020

Target Realisasi

Jika disajikan dalam bentuk grafik dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 4,42 (memuaskan) dari target 5 (sangat memuaskan). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2019 nilai ini mengalami penurunan. Untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan.

Berikut perbandingan realisasi IKU 7 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja			Target				Realisasi Tahun 2020
		2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,42	88,4%

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah

Pencapaian IKU ini sampai dengan Tahun 2024 belum memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk terus mendorong pencapaian IKU ini dengan melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK. selain itu pemberian teladan yang baik dari para Pimpinan menjadi motivasi bagi pegawai untuk dapat menerapkannya secara berkelanjutan.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, Nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 8 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	asi Capaian		
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A	AA	AA	A	BB

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 388/ND/XI/09/2020 tanggal 14 September 2020, Pencapaian IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP adalah AA (sangat memuaskan) atau diatas target yang telah ditetapkan. Penilaian ini berdasarkan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2019. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 94,39 dengan predikat AA (sangat memuaskan). Perolehan nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan Tahun 2018 dan 2019. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Itama.

Berikut perbandingan realisasi IKU 8 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja			Target			Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020
		2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Kinerja 2024
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00	A (87,00	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (94,39)	105%

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 8 sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun-

tahun selanjutnya, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 9 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja		Realisasi	asi Capaian			
		2020	2020	2020	2019	2018	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,16%	99,16%	98,99%	96,71%	

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

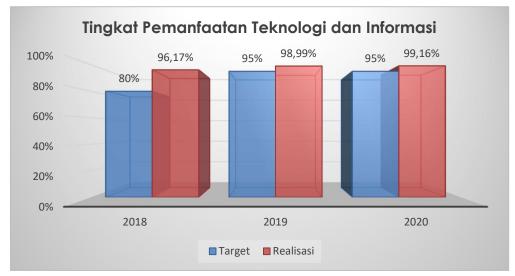
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 9 tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berupaya untuk terus berperan aktif dalam memanfaatkan layanan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pada tahun 2020 tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 99,16% dengan rincian sebagai berikut.

a. Tingkat pemanfaatan layanan dasar sebesar 100%;

- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum sebesar 96,64%;
- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan sebesar 100%;
- d. Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan sebesar 100%.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 5 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berikut perbandingan realisasi IKU 9 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator	Kinerja			Target	:		Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020 Dibanding Target Kinerja 2024
				2021	2022	2023	2024		
IKU	Tingkat	Pemanfaatan	95%	96%	97%	98%	100%	99,16%	99,16%
9	9								

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 9 pada tahun 2020 belum memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi setiap tahunnya dengan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi

kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode- metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 10 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
		2020	2020	2020	2019	2018	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	200%	200%	-	-	

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada tahun 2020, reallisasi IKU 10 tentang Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebesar 200% atau diatas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2019 dan 2018 karena perbedaan formula pengukuran, dimana tahun 2018 dan 2019 penyusunan best practice dan implementasi best practice merupakan IKU yang berdiri sendiri.

Pencapaian realisasi ini berdasarkan atas realisasi Sub IKU berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 10.1 tentang Tingkat Penyusunan Best Practice sebesar 100%. Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyusun best practice yang berjudul "Sistem Informasi Klinik" (SI-Klinik). Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 665/ND/XII.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penyampaian Penetapan Hasil Penilaian Usulan Best Practice menyatakan bahwa best practice yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipertimbangkan sebagai Innovative Practice.
- b. Realisasi Sub IKU 10.2 tentang Tingkat Penerapan best practice sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penerapan best practice "Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan Provinsi Bangka Belitung".
- c. Realisasi Sub IKU 10.3 tentang Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) sebesar 500%. BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan berupa Bantuan Rekan Sejawat (*peer assist*), Forum Berbagi Pengetahuan, Mentoring, Pendidikan dan Pelatihan, dan *Blogging*.

Berikut perbandingan realisasi IKU 10 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator K	Kinerja	Target					Realisasi	Realisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	Tahun 2020 Dibanding Target Kinerja 2024	
IKU	Tingkat	Penerapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Manajemen	Pengetahuan							

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 10 pada tahun 2020 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini dengan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 11 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja		Realisasi		Capaian	ı
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,96	3,96	-	-

Tabel 36 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 3,96 (memuaskan) atau diatas target yang telah ditetapkan. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2019 karena IKU ini merupakan IKU baru pada periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil survei pengukuran indikator.

Berikut perbandingan realisasi IKU 10 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target				Realisasi 2020	Realisasi Tahun 2020	
	2020	20 2021 2022 2023 2024		2024		Dibanding Target Kinerja 2024	
IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,8	3,8	3,8	3,8	3,96	104%

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 11 pada tahun 2020 telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan 80

jam dalam 2 tahun atau 40 jam dalam 1 tahun. *Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah akhir September. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum akhir September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sejak awal Oktober maka tanggung jawab diklat ada di satker baru.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 12 Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
		2020	2020	2020	2019	2018	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 11 dalam tiga tahun terakhir memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 107 pegawai dari 107 pegawai yang telah memenuhi standar jam pelatihan. Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 untuk dapat memenuhi pencapaian IKU ini, yaitu dengan melaksanakan diklat mandiri di Kantor Perwakilan dan mengikutkan pegawai pemeriksa mengikuti diklat di Badan Diklat. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 pelaksanaan diklat sebagian besar dilaksanakan dengan metode distance learning.

Berikut perbandingan realisasi IKU 12 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja			Target				Realisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	Tahun 2020 Dibanding Target Kinerja 2024
IKU 12	Pemenuhan Jam Dil Pengembangan Kompeter	klat 100% nsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 sampai dengan Tahun 2020 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan berperan aktif dalam mengikutkan pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat di Badan Diklat.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1. Penyerapan anggaran;
- 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- 3. Pencapaian keluaran;
- 4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 13 tahun 2020 dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Capaian	
		2020	2020	2020	2019	2018
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	92,62%	92,62%	-	-

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 13 sebesar 92,62% yang terdiri dari Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 87,70% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 100%. Realisasi IKU 13 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2019 dikarenakan formulasi pengukuran yang berbeda.

Adapun rincian atas Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut.

- 1. Penyerapan anggaran sebesar 96,32%;
- 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 99,69%
- 3. Pencapaian keluaran sebesar 99,61%;
- 4. Efisiensi sebesar 3,61%.

Untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha memperbaiki kinerja anggaran dengan melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan terencana.

Berikut perbandingan realisasi IKU 13 tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	Realisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	Tahun 2020 Dibanding Target Kinerja 2024
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	87%	100%

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Dukungan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2020, Perjanjian Kinerja disusun atas satu Sasaran Strategis yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" yang terbagi dalam dua strategi yaitu Strategi 1 "Meningkatnya Pemeriksaan yang

Berkualitas" dan Strategi 2 "Meningkatnya Layanan Pemeriksaan" dimana kedua strategi ini **tidak dibagi per tiap jenis IKU**, sehingga dukungan anggaran dapat dilihat jika menjabarkan indikator kinerja keluaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Sasaran Kegiata	ın dan Sasaran	Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp2.789.359.000,-	Rp2.725.381.367,-	97,71
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Rp570.123.000,-	Rp547.745.443,-	96,07
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Rp158.577.000,-	Rp154.421.325,-	97,38
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	Rp2.590.446.000,-	Rp2.503.082.739,-	96,63
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	Rp745.456.000,-	Rp691.153.194,-	92,72
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	Rp2.113.000,-	Rp1.615.000,-	76,43
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	Rp128.919.000,-	Rp123.793.360,-	96,02
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	Rp19.301.000,-	Rp18.696.650,-	96,87
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Sumbangan IHPS Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Rp906.270.000,-	Rp846.299.429,-	96,02
	Total Strategi Me	eningkatnya Pemeriks		Rp7.901.564.000,-	Rp7.612.188.507,-	96,23%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Rp1.435.375.000,-	Rp1.346.684.126,-	93,82
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	Rp38.000.000,-	Rp38.000.000,-	100
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp591.995.000,-	Rp575.707.000,-	97,24
			Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	Rp175.000.000,-	Rp171.800.000,-	98,17
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp6.165.080.000,-	Rp6.046.524.026	98,08
			Realisasi penyediaan layanan operasional dan	Rp3.952.511.000,-	Rp3.761.182.253,-	95,16
			pemeliharaan kantor			
		eningkatnya Layanan egiatan/Sasaran Strate	pemeliharaan kantor Pemeriksaan	Rp12.357.961.000,- Rp20.268.525.000,-	Rp11.939.897.405,- Rp19.552.085.912,-	96,62% 96,47%

Tabel 42 Indikator Kinerja Keluaran beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

analisis mendalam terhadap dukungan anggaran atas indikator kinerja pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan dikarenakan perbedaan periode renstra.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp20.268.525.000,- yang terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp7.910.564.000,- dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp7.612.188.507,-.

Berikut tabel anggaran dan realisasi RKP dan RKSP tahun 2020

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1.	LHP BPK Perwakilan	2.789.359.000	39 LHP	2.725.381.367	97,71%
a.	LHP Keuangan	1.529.412.000	14 LHP	1.522.814.822	99,57%
b.	LHP Kinerja	846.577.000	4 LHP	817.877.100	96,61%
c.	LHP DTT	413.370.000	2 LHP	384.689.445	93,06%
2.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	158.577.000	137 LHP	154.421.325	97,38%
3.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.590.446.000	22 LHP	2.503.082.739	96,63%
a.	LHP Keuangan	1.809.100.000	15 LHP	1.808.092.739	99,94%
b.	LHP Kinerja	587.082.000	6 LHP	526.969.000	89,76%
c.	LHP DTT	194.264.000	1 LHP	168.021.000	86,49%
4.	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	570.123.000	1 LHP	547.745.443	96,07%
5.	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan	745.456.000	60 Laporan	691.153.194	92,72%
a.	Laporan Pemantauan TLHP	320.800.000	30 Laporan	301.904.700	94,11%
b.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian N/D	424.656.000	30 Laporan	389.248.494	91,66%
6.	Rumusan Bahan Pendapat	2.113.000	1 Rumusan	1.615.000	76,43%
7.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	906.270.000	12 Laporan	846.299.429	93,38%
8.	Sumbangan IHPS Perwakilan	128.919.000	2 SIHPS	123.793.360	96,02%
9.	Laporan Profil Entitas	19.301.000	2 Laporan	18.696.650	96,87%
	Jumlah (1 s.d. 9)	7.910.564.000	276	7.612.188.507	96,23%

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2020

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)			%
			Keluaran		
1.	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.435.375.000	20 Laporan	1.346.684.126	93,82%
a.	Layanan Hukum Perwakilan	206.348.000	4 Laporan	206.122.741	99,89%
b.	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	383.552.000	4 Laporan	333.898.823	87,05%

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
c.	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan	297.507.000	4 Laporan	296.973.026	99,82%
d.	Layanan Keuangan Perwakilan	287.399.000	4 Laporan	272.740.096	94,90%
e.	Layanan Umum Perwakilan	260.569.000	4 Laporan	236.949.440	90,94%
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Perwakilan	804.995.000	1 Layanan	785.507.000	97,58%
3.	Layanan Perkantoran	10.117.591.000	1 Layanan	9.807.706.279	96,94%
a.	Gaji dan Tunjangan	6.165.080.000		6.046.524.026	98,08%
b.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.952.511.000		3.761.182.253	95,16%
a)	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dan TU	612.534.000		487.752.440	79,63%
b.	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	151.142.000		150.418.668	99,52%
c.	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	247.200.000		247.200.000	100,00%
d.	Layanan Perkantoran Bidang Umum	2.941.635.000		2.875.811.145	97,76%
	Jumlah (1 s.d. 3)	12.357.961.000	22	11.939.897.405	96,62%

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2020. LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh skor kinerja sebesar 100,38 atau telah memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan sasaran strategis "Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" telah tercapai.

Indikator kinerja yang telah mencapai target ataupun diatas target sebanyak 11 indikator dan 2 Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Atas indikator kinerja yang belum memenuhi target, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk terus melakukan langkah perbaikan sebagai berikut.

- a. Melakukan cross review atas penyusunan konsep LHP yang diterbitkan;
- b. Mendorong Pegawai untuk terus meningkatkan Pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional dan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas di mata pemangku pemilik kepentingan;

Untuk indikator kinerja yang telah mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi/ Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian dari tahun ke tahun dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan BPK RI dimasa yang akan datang.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel Target Pencapaian Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

_	an, Sasaran, dan garan		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp20.268.525.000,-	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan 	Rp7.910.564.000,- Rp12.357.961.000,-	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
Pemeriksaan		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
	13	Tingkat Kinerja Implementasi	83%
		Anggaran	

Lampiran II

Format Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah

Tahun Anggaran : 2020

	an, Sasaran, dan garan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Meningkatnya Pemeriksaan	Rp20.268.525.000,- Rp7.910.564.000,-	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,67%
Berkualitas • Meningkatnya Rp1 Layanan Pemeriksaan	Rp12.357.961.000,-	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	87,34%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	105%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,42
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (94,39)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,16
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	250%

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,96)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%	92,62%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp20.268.525.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019: Rp19.552.085.912,00